KATA PENGANTAR

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan perturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

MARJANI, SE, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

MARJANI, SE, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.822.434.850,00 atau mencapai 91,27% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.092.546.200,00

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 0,00, beban sebesar 2.821.399.830,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -2.821.399.830,00.

III.Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 430.815.022,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0,00 Aset Tetap sebesar Rp. 417.050.066,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 13.764.956,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 430.755.022,00, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 430.755.022,00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp. -13.306.606.148,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -2.821.399.830,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 0,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. -16.128.005.978,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.331.300.000,00	1.273.580.000,00	95,66	781.215.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.761.246.200,00	1.548.854.850,00	87,94	1.750.557.700,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	**3.092.546.200,00**	**2.822.434.850,00**	**91,27**	**2.536.972.700,00**
SURPLUS/DEFISIT	**(3.092.546.200,00)**	**(2.822.434.850,00)**	**91,27**	**(2.536.972.700,00)**

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETDA

MARJANI, SE, M.Si

NIP: 19660302 198703 1 012

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Pendapatan Transfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN				

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	1.273.580.000,00	781.215.000,00	492.365.000,00	163,03
Beban Barang dan Jasa	1.548.854.850,00	1.750.557.700,00	(201.702.850,00)	88,48
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsisdi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan	0,00	115.990.137,00	(115.990.137,00)	0,00
Beban Lain-lain	695.780,00	0,00	695.780,00	0,00
Jumlah Beban Operasi	**2.823.130.630,00**	**2.647.762.837,00**	**175.367.793,00**	**106,62**
BEBAN TRANSFER				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH BEBAN	**2.823.130.630,00**	**2.647.762.837,00**	**175.367.793,00**	**106,62**
SURPLUS/ DEFISIT - LO	**(2.823.130.630,00)**	**(2.647.762.837,00)**	**(175.367.793,00)**	**106,62**

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETDA

MARJANI, SE, M.Si

NIP: 19660302 198703 1 012

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**0,00**	**0,00**
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	(695.780,00)
Persediaan Bahan Pakai Habis	0,00	0,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	(695.780,00)
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
ASET TETAP	(429.125.483,00)	(415.259.266,00)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(1.908.419.003,00)	(1.829.775.421,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Akumulasi Penyusutan	1.758.331.035,00	1.693.553.670,00
ASET LAINNYA	(13.764.956,00)	(13.764.956,00)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Sewa	0,00	0,00
Bangun Guna Serah	0,00	0,00
Bangun Serah Guna	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	(13.764.956,00)	(13.764.956,00)
	0,00	0,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,00	0,00
KEWAJIBAN	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai	**0,00**	**0,00**
Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		
EKUITAS	0,00	0,00

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

MARJANI, SE, M.Si

NIP: 19660302 198703 1 012

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	KODE	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
PENDAPATAN			
EKUITAS AWAL		(13.306.606.148,00)	(10.716.034.474,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(2.823.130.630,00)	(2.647.762.837,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00	57.191.163,00
EKUITAS AKHIR		**(16.129.736.778,00)**	**(13.306.606.148,00)**

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

MARJANI, SE, M.Si

NIP: 19660302 198703 1 012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Brbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 17);

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
3.00.00	**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR**				
3.00.00.08	**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)**				
	BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)	**3.092.546.200,00**	**2.822.434.850,00**	**(270.111.350,00)**	**91.26**
	BELANJA LANGSUNG	**3.092.546.200,00**	**2.822.434.850,00**	**(270.111.350,00)**	**91.26**
3.00.3.00.00.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325.251.600,00	305.142.550,00	(20.109.050,00)	93.81
3.00.3.00.00.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	68.258.000,00	57.216.500,00	(11.041.500,00)	83.82
3.00.3.00.00.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	236.543.900,00	219.552.800,00	(16.991.100,00)	92.81
3.00.3.00.00.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	193.488.300,00	187.516.800,00	(5.971.500,00)	96.91
3.00.3.00.00.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	12.321.700,00	11.721.700,00	(600.000,00)	95.13
3.00.3.00.00.08.29	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	449.090.300,00	411.850.500,00	(37.239.800,00)	91.70
3.00.3.00.00.08.30	PROGRAM PANATAAN	577.403.200,00	530.311.200,00	(47.092.000,00)	91.84

	KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH				
3.00.3.00.00.08.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	844.730.600,00	738.609.050,00	(106.121.550,00)	87.43
3.00.3.00.00.08.32	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	385.458.600,00	360.513.750,00	(24.944.850,00)	93.52

2.1. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
1	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	2.576.500,00	73,61	realisasi berdasarkan besarnya pajak kendaraan tahun 2019
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.240.000,00	2.017.500,00	32,33	beberapa kegiatan yang seharusnya direvisi tahun 2019 diantaranya revisi Renstra dilaksanakan pada awal 2020. sehingga menyebabkan tidak terserapuk penggadaan di TA. 2019
3	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	10.800.000,00	7.274.000,00	67,35	Kondisi AC yang rusak untuk pemeliharaan pagunya tidak mencukupi sehingga untuk dilaksanakan perbaikan
4	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	61.645.700,00	39.695.700,00	64,39	berdasarkan disposisi dari Gubernuranggal 29 Agusus 2019 untuk kegiatan Penyusunan Pergub tenang pembentukan Cabang Dinas ditunda pelaksanaannya unuk tahun 2019

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**3.092.546.200,00**	**2.822.434.850,00**	**(270.111.350,00)**	**91,27**	**2.536.972.700,00**

Belanja pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.3.092.546.200,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.2.822.434.850,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp. 2.536.972.700,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 285.462.150,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

	5.1 BELANJA OPERASI	3.092.546.200,00	2.822.434.850,00	(270.111.350,00)	91,27	**2.531.772.700,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.092.546.200,00**	**2.822.434.850,00**	**(270.111.350,00)**	**91,27**	**2.531.772.700,00**
	5.1.1 Belanja Pegawai	1.331.300.000,00	1.273.580.000,00	(57.720.000,00)	95,66	781.215.000,00
	5.1.2 Belanja Barang dan Jasa	1.761.246.200,00	1.548.854.850,00	(212.391.350,00)	87,94	1.750.557.700,00
5.1.1	**Belanja Pegawai**	**1.331.300.000,00**	**1.273.580.000,00**	**(57.720.000,00)**	**95,66**	**781.215.000,00**

Belanja Pegawai pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 1.331.300.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.273.580.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp.781.215.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 492.365.000,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

2. Belanja Langsung	1.331.300.000,00	1.273.580.000,00	(57.720.000,00)	95,66	

- Honorarium PNSD	1.331.300.000,00	1.273.580.000,00	(57.720.000,00)	95,66	
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa	**1.761.246.200,00**	**1.548.854.850,00**	**(212.391.350,00)**	**87,94**	**1.750.557.700,00**

Belanja Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 1.761.246.200,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.548.854.850,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp. 1.750.557.700,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 201.702.850,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis	87.068.750,00	79.725.050,00	(7.343.700,00)	91,57
2. Belanja Bahan/Material	85.568.000,00	77.328.000,00	(8.240.000,00)	90,37
3. Belanja Jasa Kantor	35.342.000,00	30.992.700,00	(4.349.300,00)	87,69
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.358.000,00	32.896.000,00	(4.462.000,00)	88,06
5. Belanja Cetak dan Penggandaan	83.260.100,00	56.228.600,00	(27.031.500,00)	67,53
6. Belanja Makanan dan Minuman	309.025.000,00	224.768.200,00	(84.256.800,00)	72,73
7. Belanja Perjalanan Dinas	664.430.250,00	634.066.300,00	(30.363.950,00)	95,43
8. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	219.294.100,00	202.303.000,00	(16.991.100,00)	92,25
9. Belanja Pemeliharaan	34.400.000,00	26.897.000,00	(7.503.000,00)	78,19
10. Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	205.500.000,00	183.650.000,00	(21.850.000,00)	89,37

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.2. Laporan Operasional

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2019 (Rp)

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.2. Laporan Operasional

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2019 (Rp)
9	**BEBAN**	**2.821.399.830,00**	**2.647.762.837,00**	**173.636.993,00**	**106,56**	**2.822.434.850,00**
	9.1 BEBAN OPERASI - LO	2.821.399.830,00	2.647.762.837,00	173.636.993,00	106,56	2.822.434.850,00
9.1	**BEBAN OPERASI - LO**	**2.821.399.830,00**	**2.647.762.837,00**	**173.636.993,00**	**106,56**	**2.822.434.850,00**
	9.1.1 Beban Pegawai - LO	1.273.580.000,00	781.215.000,00	492.365.000,00	163,03	1.273.580.000,00
	9.1.2 Beban Barang dan Jasa	1.547.124.050,00	1.750.557.700,00	(203.433.650,00)	88,38	1.548.854.850,00
	9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	115.990.137,00	(115.990.137,00)	0,00	0,00
	9.1.8 Beban Lain - lain	695.780,00	0,00	695.780,00	0,00	0,00
9.1.1	**Beban Pegawai - LO**	**1.273.580.000,00**	**781.215.000,00**	**492.365.000,00**	**163,03**	**1.273.580.000,00**

Beban Pegawai - LO pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.273.580.000,00 dan realisasi Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 781.215.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 492.365.000,00 atau 163,03%. Jika Beban Pegawai - LO pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.273.580.000,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 1.273.580.000,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Pegawai - LRA 2019** **1.273.580.000,00**

  Belanja pegawai sebagai 0,00

penambah kapitalisasi aset		
Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2019	0,00	
Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2018	0,00	
Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00	
- **Beban Pegawai - LO 2019**	**1.273.580.000,00**	

9.1.2	**Beban Barang dan Jasa**	**1.547.124.050,00**	**1.750.557.700,00**	**(203.433.650,00)**	**88,38**	**1.548.854.850,00**

Beban Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.547.124.050,00 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.750.557.700,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (203.433.650,00) atau 88,38%. Jika Beban Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.547.124.050,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 1.548.854.850,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -1.730.800,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Beban Barang dan Jasa	724.928.500,00	520.056.500,00	204.872.000,00	71,74	724.928.500,00
2 Beban Persediaan	161.232.250,00	133.721.350,00	27.510.900,00	82,94	162.963.050,00
3 Beban Pemeliharaan	26.897.000,00	27.300.000,00	(403.000,00)	101,50	26.897.000,00
4 Beban Perjalanan Dinas	634.066.300,00	1.069.479.850,00	(435.413.550,00)	168,67	634.066.300,00
1 Beban Barang dan Jasa	**724.928.500,00**	**520.056.500,00**	**204.872.000,00**	**71,74**	**724.928.500,00**

Jika Beban Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.724.928.500,00 dibandingkan dengan realisasi

Beban Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 724.928.500,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

-	**Beban Barang dan Jasa - LRA 2019**	**724.928.500,00**
a.	Beban Barang dibayar dimuka Tahun Anggaran 2018	0,00
b.	Beban Barang dibayar dimuka Tahun Anggaran 2019	0,00
c.	Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2018	0,00
d.	Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2019	0,00
e.	Utang Barang dan Jasa 2018	0,00
f.	Utang Barang dan Jasa 2019	0,00
g.	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
h.	Belanja Barang dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00
i.	Belanja barang dan jasa BLUD	0,00
-	**Beban Barang dan Jasa - LO 2019**	**724.928.500,00**

2 Beban Persediaan	**161.232.250,00**	**133.721.350,00**	**27.510.900,00**	**82,94**	**162.963.050,00**

Jika Beban Persediaan pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.161.232.250,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan - LRA sebesar Rp. 162.963.050,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -1.730.800,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Persediaan - LRA 2019**	**162.963.050,00**
a. Persediaan Tahun Anggaran 2019	0,00
b. Persediaan Tahun Anggaran 2018	695.780,00
c. Persediaan Lain-lain (Nilai dibawah Kapitalisasi) 2019	0,00
d. Persediaan Lain-lain (Nilai dibawah Kapitalisasi) 2018	-695.780,00
e. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
f. Belanja Persediaan yag menjadi Aset	0,00
g. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2019	0,00
h. Utang Persediaan (belanja yang	0,00

diserahkan) 2018					
i. P3D dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi	0,00				
j. P3D dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat	0,00				
- **Beban Persediaan - LO 2019**	**162.963.050,00**				
3 Beban Pemeliharaan	**26.897.000,00**	**27.300.000,00**	**(403.000,00)**	**101,50**	**26.897.000,00**

Jika Beban Pemeliharaan pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26.897.000,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA sebesar Rp. 26.897.000,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Pemeliharaan - LRA 2019**	**26.897.000,00**	
a. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019		0,00
b. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018		0,00
c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset		0,00
d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset		0,00

- **Beban Pemeliharaan - LO 2019**	**26.897.000,00**				
4 Beban Perjalanan Dinas	**634.066.300,00**	**1.069.479.850,00**	**(435.413.550,00)**	**168,67**	**634.066.300,00**

Beban Perjalanan Dinas pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.634.066.300,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 634.066.300,00

- **Beban Perjalanan Dinas - LRA 2019**	**634.066.300,00**				
a. Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00				
- **Beban Perjalanan Dinas - LO 2019**	**634.066.300,00**				
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	**0,00**	**115.990.137,00**	**(115.990.137,00)**	**0,00**	

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.115.990.137,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (115.990.137,00) atau 0,00% dirincikan sebagai berikut :

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	115.990.137,00	(115.990.137,00)	0,00
9.1.8 Beban Lain - lain	**695.780,00**	**0,00**	**695.780,00**	**0,00**

Beban Lain - lain pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.695.780,00 dan realisasi Beban Lain - lain Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 695.780,00 atau 0,00% dirincikan sebagai berikut :

1 Beban Lain-lain	695.780,00	0,00	695.780,00

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.3 Penjelasan atas Neraca

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
1	**ASET**	**430.815.022,00**	**429.720.002,00**
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :		
	1.1 Aset Lancar	0,00	695.780,00
	1.3 Aset Tetap	417.050.066,00	415.259.266,00
	1.4 Aset Lainnya	13.764.956,00	13.764.956,00
	Jumlah Aset	430.815.022,00	429.720.002,00
1.1	**ASET LANCAR**	**0,00**	**695.780,00**
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :		
	1.1.7 Persediaan	0,00	695.780,00
	Jumlah Aset Lancar	0,00	695.780,00
1.1.1	**Kas Bendahara Penerimaan**	**0,00**	**0,00**
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetorkan ke Kas Daerah.		
	1. Pendapatan Yang Belum Disetor		0,00
	2. Uang Titipan		0,00

1.1.2	**Kas Bendahara Pengeluaran**	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan.

1. Sisa Kas UP/GU/TU	0,00
2. Pajak di SKPD yang Belum Disetor	0,00
3. Uang Titipan	0,00
4. Jasa Giro	0,00
5. Kas Lainya	0,00

1.1.3	**Piutang Pendapatan**	**0,00**	**0,00**

Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah.

1	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00

Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

2	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pengembalian.

1.1.4	**Piutang Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.

1	Angsuran Rumah Dinas	0,00	0,00
2	Angsuran Kendaraan Dinas	0,00	0,00
	Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

1.1.5	**Penyisihan Piutang**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan penyisihan piutang retribusi.

1	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.

c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.

d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

2	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.

c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

1.1.6	**Beban Dibayar Dimuka**	**0,00**	**0,00**

Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi dibayar dimuka dan

	Sewa gedung)		
1	Asuransi dibayar dimuka	0,00	0,00
2	Sewa gedung	0,00	0,00
	Jumlah Beban dibayar dimuka	0,00	0,00

1.1.7 Persediaan **0,00** **695.780,00**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.

1	Persediaan Bahan Pakai Habis	0,00	0,00
2	Persediaan Bahan/ Material	0,00	0,00
3	Persediaan Barang Lainnya	0,00	695.780,00
	Jumlah Persediaan	0,00	695.780,00

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG **0,00** **0,00**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.3 ASET TETAP **417.050.066,00** **415.259.266,00**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

1.3.1 Tanah	0,00	0,00
1.3.2 Peralatan dan Mesin	1.810.036.221,00	1.829.775.421,00
1.3.3 Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1.3.5 Aset Tetap Lainnya	279.037.515,00	279.037.515,00
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(1.672.023.670,00)	(1.693.553.670,00)
Jumlah Aset Tetap	417.050.066,00	415.259.266,00

1.3.1 Tanah **0,00** **0,00**

1	Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2018	0,00
2	Mutasi Bertambah	0,00
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00
	2.2 Beban	0,00
	2.3 Atribusi	0,00
	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00
	2.7 Rusak Berat	0,00
	2.8 Revaluasi	0,00
	2.9 Reklas	0,00
	2.10 Beban	0,00
	2.11 Extracompatable	0,00
3	Mutasi Berkurang	0,00
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00
	3.2 Penghapusan	0,00
	3.3 Pengalihan antar OPD	0,00
	3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00

	3.5 Rusak Berat	0,00	
	3.6 Revaluasi	0,00	
	3.7 Reklas	0,00	
	3.8 Beban	0,00	
	3.9 Extracompatable	0,00	
5	Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2019	0,00	
1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	**1.810.036.221,00**	**1.829.775.421,00**
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018	1.829.775.421,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Beban	0,00	
	2.3 Atribusi	0,00	
	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00	
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00	
	2.7 Koreksi	0,00	
	2.8 Revaluasi	0,00	
	2.9 Reklas	0,00	
	2.10 Blud	0,00	

	3	Mutasi Berkurang	0,00	
		3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
		3.2 Penghapusan	0,00	
		3.3 Pengalihan antar OPD	0,00	
		3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00	
		3.5 Rusak Berat	0,00	
		3.6 Koreksi	0,00	
		3.7 Revaluasi	0,00	
		3.8 Reklas	0,00	
		3.9 Beban	0,00	
		3.10 Extracompatable	0,00	
	5	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019	1.829.775.421,00	
1.3.3		**Gedung dan Bangunan**	**0,00**	**0,00**
	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018	0,00	
	2	Mutasi Bertambah	0,00	
		2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
		2.2 Beban	0,00	
		2.3 Atribusi	0,00	

	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00	
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00	
	2.7 Koreksi	0,00	
	2.8 Revaluasi	0,00	
	2.9 Blud	0,00	
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	3.2 Penghapusan	0,00	
	3.3 Pengalihan antar OPD	0,00	
	3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00	
	3.5 Rusak Berat	0,00	
	3.6 Revaluasi	0,00	
	3.7 Reklas	0,00	
	3.8 Beban	0,00	
	3.9 Extracompatable	0,00	
5	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019	0,00	
1.3.4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**0,00**	**0,00**

1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2018	0,00
2	Mutasi Bertambah	0,00
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00
	2.2 Beban	0,00
	2.3 Atribusi	0,00
	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00
	2.7 Revaluasi	0,00
	2.8 Reklas	0,00
	2.9 Blud	0,00
3	Mutasi Berkurang	0,00
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00
	3.2 Penghapusan	0,00
	3.3 Pengalihan antar OPD	0,00
	3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00
	3.5 Rusak Berat	0,00
	3.6 Revaluasi	0,00

	3.7 Reklas	0,00	
	3.8 Beban	0,00	
	3.9 Extracompatable	0,00	
	5 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019	0,00	
1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	**279.037.515,00**	**279.037.515,00**
	1 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018	279.037.515,00	
	2 Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Beban	0,00	
	2.3 Atribusi	0,00	
	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00	
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00	
	2.7 Revaluasi	0,00	
	2.8 Reklas	0,00	
	2.9 Blud	0,00	
	3 Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	3.2 Penghapusan	0,00	

	3.3 Pengalihan antar OPD	0,00	
	3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00	
	3.5 Rusak Berat	0,00	
	3.6 Revaluasi	0,00	
	3.7 Reklas	0,00	
	3.8 Beban	0,00	
	3.9 Extracompatable	0,00	
5	Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019	279.037.515,00	
1.3.6	**Kontruksi Dalam Pengerjaan**	**0,00**	**0,00**
1	Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018	0,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Beban	0,00	
	2.3 Atribusi	0,00	
	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00	
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00	
	2.7 Revaluasi	0,00	

	2.8 Reklas	0,00	
	2.9 Blud	0,00	
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	3.2 Penghapusan	0,00	
	3.3 Pengalihan antar OPD	0,00	
	3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00	
	3.5 Rusak Berat	0,00	
	3.6 Revaluasi	0,00	
	3.7 Reklas	0,00	
	3.8 Beban	0,00	
	3.9 Extracompatable	0,00	
5	Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019	0,00	
1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	**(1.672.023.670,00)**	**(1.693.553.670,00)**

Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, rincian penjelasan sebagai berikut :

1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.672.023.670,00)	(1.693.553.670,00)
-	Per 31 Desember 2018	1.693.553.670,00	
-	Koreksi	0,00	
-	Setelah Koreksi	1.693.553.670,00	

	- Penyusutan tahun 2019	589.829.277,00	
	- Per 31 Desember 2019	1.763.522.133,00	
	2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	- Per 31 Desember 2018	0,00	
	- Koreksi	0,00	
	- Setelah Koreksi	0,00	
	- Penyusutan tahun 2019	0,00	
	- Per 31 Desember 2019	0,00	
	3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	- Per 31 Desember 2018	0,00	
	- Koreksi	0,00	
	- Setelah Koreksi	0,00	
	- Penyusutan tahun 2019	0,00	
	- Per 31 Desember 2019	0,00	
1.4	**ASET LAINNYA**	**13.764.956,00**	**13.764.956,00**

Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

1.4.4 Aset Lain-lain	13.764.956,00	13.764.956,00
Jumlah Aset Lainnya	13.764.956,00	13.764.956,00

1.4.1	**Tagihan Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**

Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah

	1 Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
	2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.4.2	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**0,00**	**0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna

	1 Sewa	0,00	0,00
	2 Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
	3 Bangun Guna Serah	0,00	0,00

	4 Bangun Serah Guna	0,00	0,00
1.4.3	**Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**
	1 Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
	- Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2018	0,00	
	- Mutasi Bertambah	0,00	
	1.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	1.2 Beban	0,00	
	1.3 Atribusi	0,00	
	1.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	1.5 Pengalihan antar OPD	0,00	
	1.6 Pengalihan antar fungsi	0,00	
	1.7 Revaluasi	0,00	
	1.8 Reklas	0,00	
	1.9 Blud	0,00	
	- Mutasi Berkurang	0,00	
	1.10 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	1.11 Penghapusan	0,00	
	1.12 Pengalihan antar OPD	0,00	
	1.13 Pengalihan antar Fungsi	0,00	

	1.14 Rusak Berat	0,00	
	1.15 Revaluasi	0,00	
	1.16 Reklas	0,00	
	1.17 Beban	0,00	
	1.18 Extracompatable	0,00	
	- Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2019	0,00	
	2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.4.4	**Aset Lain-lain**	**13.764.956,00**	**13.764.956,00**
	1 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2018	13.764.956,00	
	2 Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Beban	0,00	
	2.3 Atribusi	0,00	
	2.4 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	2.5 Pengalihan antar OPD	0,00	
	2.6 Pengalihan antar fungsi	0,00	
	2.7 Revaluasi	0,00	
	2.8 Reklas	0,00	
	2.9 Blud	0,00	

	3 Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
	3.2 Penghapusan	0,00	
	3.3 Pengalihan antar OPD	0,00	
	3.4 Pengalihan antar Fungsi	0,00	
	3.5 Rusak Berat	0,00	
	3.6 Revaluasi	0,00	
	3.7 Reklas	0,00	
	3.8 Beban	0,00	
	3.9 Extracompatable	0,00	
	5 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2019	13.764.956,00	
2	**KEWAJIBAN**	**0,00**	**0,00**
	2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**0,00**	**0,00**
	2.1.1 Utang PPh Pusat	0,00	0,00
	2.1.1.1 PPH21		0,00
	2.1.1.2 PPH22		0,00
	2.1.1.3 PPH23		0,00
	2.1.1.4 PPH4		0,00

2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2.1.2.1 PPN		0,00
2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
2.2 Pendapatan Diterima Dimuka	**0,00**	**0,00**
2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00
2.3 Utang Belanja	**0,00**	**0,00**
2.3.1 Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan		0,00
2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS		0,00
2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		0,00
2.3.1.4 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah		0,00
2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah		0,00
2.3.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		0,00
2.3.1.7 Honorarium PNSD		0,00
2.3.1.8 Honorarium Non PNSD		0,00
2.3.1.9 Honorarium Pengelola Dana BOS		0,00
2.3.1.10 Jasa Pelayanan Kesehatan		0,00
2.3.1.11 Belanja Pegawai BLUD		0,00
2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00

2.3.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis	0,00
2.3.2.2 Belanja Bahan/Material	0,00
2.3.2.3 Belanja Jasa Kantor	0,00
2.3.2.4 Belanja Premi Asuransi	0,00
2.3.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00
2.3.2.6 Belanja Cetak Dan Pengadaan	0,00
2.3.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00
2.3.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00
2.3.2.9 Belanja Sewa Alat Berat	0,00
2.3.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00
2.3.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	0,00
2.3.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00
2.3.2.13 Belanja Pakaian Kerja	0,00
2.3.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00
2.3.2.15 Belanja Perjalanan Dinas	0,00
2.3.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
2.3.2.17 Belanja kursus, latihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0,00

2.3.2.18 Belanja Pemeliharaan		0,00
2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi		0,00
2.3.2.20 Belanja Barang Dana BOS		0,00
2.3.2.21 Belanja Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah		0,00
2.3.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS		0,00
2.3.2.23 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD		0,00
2.3.2.24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat		0,00
2.3.2.25 Belanja Barang dan Jada BLUD		0,00
2.3.2.26 Belanja Bantuan Sosial Barang		0,00
2.3.3 Utang Belanja Modal	0,00	0,00
2.3.3.1 Belanja Tanah		0,00
2.3.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin		0,00
2.3.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan		0,00
2.3.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00
2.3.3.5 Belanja Aset Tetap Lainya		0,00
2.3.3.6 Belanja Aset Lainya		0,00

	Jumlah Kewajiban	0,00	0,00
3	**EKUITAS**	**430.755.022,00**	**429.720.002,00**

Pada Neraca per 31 Desember 2019 Ekuitas sebesar 430.755.022,00 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2018 saldo Ekuitas sebesar 429.720.002,00

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**430.755.022,00**	**429.720.002,00**

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal	**(13.306.606.148,00)**
2 Surplus/ Defisit - LO	**(2.823.130.630,00)**
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional	(2.823.130.630,00)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional	0,00
2.3 Pos Luar Biasa	0,00

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

3.1 Koreksi Nilai Persediaan **0,00**

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap **0,00**

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.3 Lain - lain **0,00**

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

Edit Refresh

a. Penyisihan Piutang	0,00
b. Koreksi Penyusutan	0,00
c. Hibah Keluar	0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD	0,00
e. Mutasi Keluar Aset OPD	0,00
f. Penghapusan Persediaan APBN	0,00
g. Perubahan Kode Rekening	0,00
h. Koreksi Tanah	0,00
i. Koreksi Utang Belanja	0,00
j. Reklass Antar Akun	0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
l. Penyertaan Modal	0,00
m. Persediaan APBN yang belum	0,00

	n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	0,00
	o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	0,00
	p. Koreksi Gedung dan Bangunan	0,00
	q. Koreksi Persediaan	0,00
	r. Koreksi Kas	0,00
	s. Extracompatable	0,00
	t. Koreksi Peralatan Dan Mesin	0,00
4	**Ekuitas Akhir**	**(16.129.736.778,00)**

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1Gambaran Umum

Biro Organisasi merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar. Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4.2Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tugas pokok Biro Organisasi adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah dibidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan serta Analisis Jabatan dan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah.

4.3Struktur Organisasi

Struktur Biro Organisasi terdiri dari Kepala Biro membawahi 3 bagian terdiri dari : Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah.

4.4Visi dan Misi

Penjelasan

Edit Refresh

Pontianak, 31 Desember 2019
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

MARJANI, SE, M.Si
NIP: 19660302 198703 1 012

BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019.

Pontianak, 31 Desember 2019
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

MARJANI, SE, M.Si

Lampiran 1

ANALISIS

PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : 3.00.00.08 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

a. ANALISIS VERTIKAL		
1) Analisis vertikal dalam LRA		
Uraian		**Persamaan**
Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja		Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja
RUMUS		
SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN	:	(2.822.434.850,00)
TOTAL PENDAPATAN	:	0,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	:	2.822.434.850,00
Selisih	**:**	**0,00**
2) Analisis vertikal dalam Neraca		
Uraian		**Persamaan**
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas		Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS		
ASET	:	430.815.022,00
KEWAJIBAN	:	0,00
EKUITAS	:	430.755.022,00
Selisih	**:**	**60.000,00**
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.		Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

RUMUS		
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	0,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	:	0,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	0,00
Selisih	**:**	**0,00**

3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO)

Uraian		**Persamaan**
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegaitan Non Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa(LO)		Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan(LO) - Total Beban(LO)+/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional(LO) +/- Pos Luas Biasa(LO)
RUMUS		
SURPLUS(DEFISIT) LO	:	(2.821.399.830,00)
TOTAL PENDAPATAN(LO)	:	0,00
TOTAL BEBAN(LO)	:	(2.821.399.830,00)
TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAL	:	0,00
TOTAL POS LUAR BIASA	:	0,00
Selisih	**:**	**0,00**

4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian		**Persamaan**
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah(dikurangi) surplus/defisit LO ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas		Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS		
Ekuitas Akhir	:	(16.128.005.978,00)
Ekuitas Awal	:	(13.306.606.148,00)
Surplus/defisit LO	:	(2.821.399.830,00)
Koreksi	:	0,00

Selisih	:	**0,00**
b. ANALISIS HORIZONTAL		
1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca		
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL TANAH	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET TANAH 2019	:	0,00
- ASET TANAH 2018	:	0,00
Selisih	:	**0,00**
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	-19.739.200,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2019	:	1.810.036.221,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2018	:	1.829.775.421,00
Selisih	:	**19.739.200,00**
selisih ini adalah barang yang direklas ke ekstrakom sebesar Rp. 21.530.000,-		
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00

- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2019	:	0,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2018	:	0,00
Selisih	**:**	**0,00**
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2019	:	0,00
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2018	:	0,00
Selisih	**:**	**0,00**
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET TETAP LAINNYA 2019	:	279.037.515,00
- ASET TETAP LAINNYA 2018	:	279.037.515,00
Selisih	**:**	**0,00**
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET LAINNYA 2019	:	13.764.956,00
- ASET LAINNYA 2018	:	13.764.956,00

Selisih	:	**0,00**
2) Analisis horizontal antara LO,Laporan Perubahan Equitas dan Neraca		
Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya		Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya
RUMUS		
EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	(13.306.606.148,00)
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA)	:	(13.306.606.148,00)
Selisih	:	**0,00**
Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas		Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas
RUMUS		
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)	:	(2.821.399.830,00)
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	(2.821.399.830,00)
Selisih	:	**0,00**
Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca		Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca
RUMUS		
EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	(16.128.005.978,00)
EKUITAS (NERACA)	:	(16.128.005.978,00)
Selisih	:	**0,00**
3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca		
Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun		Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun
RUMUS		
PENDAPATAN PAJAK (LO)	:	0,00

PENDAPATAN PAJAK (LRA)	:	0,00
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA)	:	0,00
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA)	:	0,00
Selisih	**:**	**0,00**
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun		Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun
RUMUS		
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO)	:	0,00
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA)	:	0,00
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA)	:	0,00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA)	:	0,00
Selisih	**:**	**0,00**
Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persdiaan Akhir Tahun		Beban Persediaan(LO)=Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)+Persediaan Awal Tahun-Persediaan Akhir Tahun.Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau *weighted average*
RUMUS		
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:	161.232.250,00
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:	162.963.050,00
PERSEDIAAN AWAL TAHUN	:	0,00
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	:	0,00
PERSEDIAAN LAIN LAIN AWAL TAHUN	:	695.780,00
PERSEDIAAN LAIN LAIN AKHIR TAHUN	:	0,00
Selisih	**:**	**(2.426.580,00)**
ekstracompatable		

Lampiran 2

PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2019
YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2019

SKPD : 3.00.00.08 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

NO	URAIAN	REALISASI 2019		SELISIH	KETERANGAN	
		BELANJA MODAL	NERACA		Nilai	Penjelasan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00		
2	Peralatan dan Mesin	0,00	-19.739.200,00	19.739.200,00		
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00		
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00		
6	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00		
	Extracomptable					
7	Persediaan Lain lain	0,00	-695.780,00	695.780,00		
8	Aset Tetap	0,00	1.790.800,00	(1.790.800,00)		
Jumlah		**0,00**	**-18.644.180,00**	**18.644.180,00**	**0,00**	